

Bunga Rampai Pemikiran Akademisi

Transisi Kenormalan Baru : Eksistensi BUM Desa, UMKM, dan Ormas

Editor:
Arimurti Kriswibowo
Dandi Darmadi



**Penerbit Program Studi Administrasi Negara
UPN "Veteran" Jawa Timur**

Transisi Kenormalan Baru : Eksistensi BUM Desa, UMKM, dan Ormas

Editor:

Arimurti Kriswibowo
Dandi Darmadi

Tim Penyusun: TK.Harahap, D.Hertati, Mashudi, L.Fauziah, JB.Sukoco, A.Windriya, A.Roziqin, FFA.Santaufanny, BA. Nafi'ah, MD.Yanuar, LS.Rahmatin, E.Hidayat, K.Bataha, NR.Hapsari, S.Fauziah, AI.Baihaqi, N.Azizah, WC.Izaak, Wahyuni, dan J. Mijiarto

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh :

Penerbit Program Studi Administrasi Publik

FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar

Kota Surabaya, Jawa Timur

Telepon : 8794257

Email : penerbit.adne@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

e-ISBN : 978-623-92037-4-0

Terbitan Pertama, Oktober 2021

BAGIAN I

Pariwisata Bumdes dan Covid – 19

Leily Suci Rahmatin..... 1

Tipologi Strategi BUMDes Saat Pandemi Covid-19

Binti Azizatul Nafi'ah dan Muhammad Dedy Yanuar9

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Benteng Ketahanan Ekonomi Desa Selama Pandemi

Endik Hidayat..... 17

Pemasaran Media Sosial di Saat Pandemi Covid 19

Aufa Izzuddin Baihaqi.....25

Business Sustainability dan E-Commerce Sebagai Tool Marketplace dengan Dukungan Digital Marketing di Masa Pandemi Covid-19

Sumainah Fauziah, Katerina Bataha dan Nurul Retno Hapsari.....35

Digital Marketing: Strategi Bertahan UMKM Sari Buah Mangrove Wonorejo di Masa Pandemi

Wahyuni dan Joko Mijiarto.....45

E-Commerce Produk Pertanian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Sustainability

Nurul Retno Hapsari, Sumainah Fauziah, Katerina Bataha63

Kajian Kualitas SDM Logistik dalam Revolusi Industri 4.0 di Masa Pandemi Covid 19

Mashudi, Luluk Fauziah, Johan Bhimo Sukoco, dan Anafil W69

Kontrol Negara dan Eksistensi Ormas dalam Memantau Ceramah Agama Tentang Pandemi Covid 19

Tuti Khairani Harahap.....83

Kebijakan Vaksinasi Sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ertien Rining Nawangsari, Hilmalia Ardha Dilla, Diaz Ardhani, Jihan Salsabillah Anaqoh, Ridhotul Khafshoh Islami, Ivan Hendri S.....97

BAGIAN II

Modal Sosial Untuk Resiliensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Adaptasi Kenormalan Baru

Katerina Bataha, Nurul Retno Hapsari, Sumainah Fauziah.....113

Pengembangan Sistem *Technology, Organization and Environment* Pada BUMDes Untuk Menunjang Fungsi Teknologi Informasi dan *E-Business* dalam Menjawab Tantangan Adaptasi Kebiasaan Baru di Jawa Timur

Wilma Cordelia Izaak.....123

Strategi Menghadapi Perubahan : Sebuah Manajemen Transformasi Bisnis Digital (Studi Literatur dari Three Common Trap Bisnis Digital)

Nurul Azizah135

Harapan Pada Aparatur Millenial Untuk Agenda Reformasi di Masa Depan

Ali Roziqin dan Farah Fadilla Anugrah Santaufanny.....149

Penerapan Kebijakan Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia

Diana Hertati159

Biodata Para Penulis 178

KEBIJAKAN VAKSINASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Ertien Rining Nawangsari, Hilmalia Ardha Dilla, Diaz Ardhani, Jihan Salsabillah Anaqoh, Ridhotul Khafshoh Islami, Ivan Hendri Santoso

Pengutipan: Nawangsari, E.R., Dkk. (2021). Kebijakan Vaksinasi sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia. In Kriswibowo, A & Darmadi, D (Eds.), *Transisi Kenormalan Baru: Eksistensi BUM Desa, UMKM, dan Ormas*. Surabaya: Penerbit Program Studi Administrasi Publik.

Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, masih terus terjadi hingga awal tahun 2021 tentu berdampak pada semua sektor kehidupan negara. Bukan hanya menyerang pada bidang kesehatan saja. Namun juga menyerang bidang pemerintahan lain meliputi bidang pendidikan yang harus *learn from home*, bidang pariwisata yang lesu, peribadatan yang terganggu, bidang politik pemerintahan, kondisi sosial, hingga perekonomian negara juga ikut terganggu. Hal tersebut menimbulkan bermacam-macam pandangan dan persepsi terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi ini.

Respon Pemerintah Indonesia sebagai negara besar dengan populasi urutan keempat di dunia terkesan sangat lamban dalam upaya penanganan krisis ini. Pengambilan kebijakan yang kurang responsif dan keliru terhadap masifnya penyebaran virus tentu dapat membahayakan jutaan rakyat Indonesia, termasuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan covid-19. Hal ini dapat dilihat, pada bulan awal tahun 2020 ketika virus corona mulai melumpuhkan beberapa kota di Cina, Korea Selatan, Italia, dan lainnya. Beberapa negara tersebut segera mengambil kebijakan untuk menutup migrasi manusia lintas negara. Namun, kebijakan lain diambil oleh pemerintah Indonesia dengan berupaya menarik wisatawan dan bisnis dari negara-negara yang tengah melakukan *lockdown* dan membatasi akses keluar masuk ke negara.

Selain itu, narasi yang diutarakan oleh beberapa elite politik di Indonesia terkesan meremehkan ganasnya virus corona dan menganggap bahwa virus tersebut tidak akan masuk negara ini. Namun, respons sedikit berubah ketika kasus Covid-19 pertama ditemukan pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu, pemerintah turut mengadopsi kebijakan dari negara-negara yang relatif

berhasil menekan penyebaran virus, tetapi menolak kebijakan *lockdown* yang ketat dengan alasan dapat melumpuhkan perekonomian negara dan warga. Akibatnya, jumlah kasus yang terinfeksi positif Covid-19 menjadi terus melonjak sejak dari kasus pertama diumumkan.

Pandemi Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai masalah publik, Sahya (2014), menyatakan bahwa suatu peristiwa permasalahan akan menjadi masalah publik apabila terdapat orang atau kelompok yang bergerak atau melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Permasalahan publik mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dalam masalah-masalah yang mempunyai dampak luas. Dengan demikian perlu adanya kebijakan-kebijakan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi ini.

Beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah Indonesia meliputi melarang semua penerbangan dari dan ke China; menghentikan pemberian visa bagi warga negara China untuk melakukan perjalanan ke Indonesia; membatasi perjalanan dari dan ke beberapa negara dengan kasus yang tinggi seperti Italia, Korea Selatan, dan Iran; meliburkan sekolah, kampus, termasuk beberapa kantor pemerintahan dan perusahaan swasta dan menerapkan *work from home*; hingga menutup pusat-pusat hiburan. Pemerintah mereplikasi kebijakan dari negara-negara yang berhasil –meratakan kurva penyebaran Covid-19 untuk mengendalikan penyebaran virus ini.

Upaya replikasi kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk sensitifitas pemerintah pada kebijakan-kebijakan yang sudah diformulasi dan diimplementasikan oleh negara-negara lain yang dianggap berhasil. Beberapa kebijakan tersebut diambil karena Pemerintah Indonesia sadar bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana berskala nasional yang harus diselesaikan dengan cara yang luar biasa (*extra-ordinary*). Sehingga, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebab *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020.

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun di Indonesia, menuntut pemerintah tidak hanya tinggal diam dan terus melakukan upaya agar Indonesia bisa melewati krisis yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap kehidupan masyarakat ini. Salah satu tindakan

yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menyediakan vaksin Covid-19. Pemerintah mengambil beberapa kebijakan terkait vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Dengan demikian, negara ini memasuki tahap baru seiring dengan kabar pelaksanaan proses vaksinasi yang mulai dilakukan.

Sebelum mengimplementasikan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) bekerjasama dengan UNICEF dan WHO melakukan survey terkait vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan secara daring sebagai upaya mengetahui respon masyarakat tentang vaksin covid-19. Hasil survey menunjukkan di atas setengah dari keseluruhan peserta survey, yaitu 74% responden mengetahui potensi vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan meskipun informasi yang didapat bervariasi sesuai wilayah dan status ekonomi dari responden. Hasil survey juga menunjukkan sekitar dua per tiga responden memiliki kemungkinan besar untuk bersedia divaksin dengan variasi wilayah penerimaan terendah adalah Aceh dan tertinggi adalah Papua Barat, serta kelompok sosial yang tertinggi memberi respon adalah kelas menengah.

Dengan melihat fakta jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia yang masih tinggi, kebijakan untuk membeli vaksin dan melakukan vaksinasi Covid-19 memang menjadi jalan paling rasional untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Setiap orang sepakat bahwa vaksinasi adalah sesuatu yang krusial dilakukan di negara ini. Pemerintah juga sedang gencar melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Pemerintah juga mulai melaksanakan program vaksinasi pada tanggal 13 Januari 2021, dengan beberapa prioritas vaksinasi mengingat keterbatasan jumlah vaksin yang diimpor. Namun, kritikan yang didapat pemerintah atas penanganan Covid-19 belangsung hingga ke tahap pembelian vaksin ini. Kebijakan yang diambil ini terkesan tergesa-gesa dan belum disertai pembuktian secara empiris akan keefektifan lanjutan vaksin. Oleh karena itu, selanjutnya akan diulas mengenai implementasi kebijakan vaksin untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

A. Pelaksanaan Vaksinasi Covid Di Indonesia

Vaksinasi di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021, tepatnya di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo

menjadi orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Vaksinasi tersebut menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19.

Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi nasional adalah CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co.Ltd. yang bekerja sama dengan PT. Bio Farma (Persero) dan telah melalui uji klinis melibatkan 1.620 relawan di Bandung. Vaksin tersebut juga telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. Vaksin Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Untuk itu, para penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi dan diingatkan untuk kembali menerima vaksin untuk kedua kalinya.

Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan, vaksin Sinovac sudah terbukti aman dan efektif pada lansia. Efikasi vaksin Sinovac untuk lansia pada uji klinis ini bahkan mencapai 98%. Dari uji klinis ini juga ditemukan bahwa efek samping yang dirasakan umumnya bersifat ringan dan sedang. Efek samping paling banyak adalah nyeri di tempat suntikan. Efek samping lainnya yang juga bisa muncul adalah demam, rasa lelah, batuk ringan, mual, dan diare. Namun, efek samping tersebut hilang dalam 2 hari.

Rencananya, setelah dilakukan vaksinasi terhadap presiden dan orang-orang pilihannya, akan dilaksanakan vaksinasi nasional melalui dua tahap. Dalam tahapan ini, pemerintah mengutamakan pihak-pihak yang berperan penting dalam kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, terkhususnya terkait penanganan Covid-19. Sasaran tahap pertama vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran tahap kedua vaksinasi adalah warga lansia dan petugas pelayanan publik.

Diumumkannya sasaran dari kedua tahapan tersebut, disambut dukungan oleh masyarakat. Masyarakat berpikir bahwa memang sudah seharusnya pemerintah bertindak cepat dalam melindungi mereka, terutama tenaga kesehatan. Mengingat bahwa para tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan Covid-19 dan sangat beresiko terpapar virus. Jika diantara mereka ada yang terpapar, maka tenaga kesehatan kita sedikit

demis sedikit akan berkurang. Hal tersebut nantinya dapat menghambat upaya penanganan dan justru akan meningkatkan angka pasien Covid-19 di Indonesia.

Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021. Kemenkes sudah menyebarkan undangan pelaksanaan vaksinasi kepada 598.483 tenaga kesehatan dari target 1,4 juta tenaga kesehatan. Sementara itu, sisanya, yakni sebanyak 888.282 tenaga kesehatan juga sudah diberi undangan yang sama pada 21 Januari 2021. Hingga tanggal 22 Januari 2021 sudah lebih dari 132.000 tenaga kesehatan yang disuntik vaksin Covid-19. Jumlah ini merupakan akumulasi dari sembilan hari pelaksanaan vaksinasi sejak tanggal 14 Januari 2021. Jumlah itu berasal dari 13.525 fasilitas kesehatan yang tersebar di 92 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jumlah itu setara dengan 22 persen dari total 598.483 tenaga kesehatan.

Selain tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik juga sangat berperan penting dalam berjalannya pemerintahan di era pandemi seperti ini. Selama pandemi, pelayanan publik tetap dibuka dengan diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, tentu saja para petugas memiliki tingkat resiko terpapar Covid-19 yang sangat besar. Diketahui bahwa pekerjaan mereka mengharuskan untuk berhadapan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Jika tidak begitu, maka pelayanan akan terhambat dan masyarakat tidak mendapat hak yang seharusnya di dapat. Hal tersebut akan menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik dan akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah. Oleh sebab itu, vaksinasi petugas pelayanan menjadi salah satu yang utama dalam program ini.

Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua dilaksanakan pada 17 Februari 2021. Kelompok penerima vaksin Covid-19 tahap kedua di antaranya adalah Petugas Pelayanan Publik termasuk pedagang pasar, guru, petugas transportasi publik dan lain-lain, serta juga kelompok masyarakat lanjut usia (60 tahun ke atas). Di tahap kedua pelaksanaan vaksinasi Covid-19 setelah tenaga kesehatan, ada 21 juta Lansia (berusia di atas 60 tahun) yang menjadi sasaran prioritas. Vaksinasi untuk target kelompok ini akan dimulai di Jakarta dan ibu kota provinsi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Namun, dalam fase awal diprioritaskan dahulu untuk Jawa dan Bali dimana lebih dari 65 persen kasus Covid-19 nasional tercatat.

Selain lansia dan petugas pelayanan, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi untuk pedagang karena mereka paling sering berinteraksi dengan konsumen. Vaksinasi pedagang pasar ini melalui dua tahap. Pada tahap pertama (17-21 Februari 2021), sebanyak 9.729 pedagang yang divaksin. Sementara, tahap kedua sebanyak 2.267 pedagang yang disuntik vaksin virus corona pada 22-24 Februari. Totalnya 11.996 orang yang telah divaksin dalam 6 hari. Sedangkan khusus di DKI Jakarta, daftar prioritas vaksinasi Covid-19, tercatat ada 55.000 pedagang yang akan divaksinasi.

Vaksinasi Covid-19 tahap dua untuk kategori Petugas Pelayanan Publik saat ini sudah memasuki tahap pelaksanaan vaksinasi untuk Guru dan Tenaga Pendidik, dengan sasaran sebanyak 5,8 juta guru dan tenaga pendidik yang divaksinasi. Guru dan tenaga pendidik, jadi salah satu prioritas penerima vaksinasi agar nanti di awal semester kedua pendidikan secara tatap muka bisa dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik dimulai dari tanggal 24 Februari 2021 dan ditargetkan selesai hingga akhir Juni 2021. Hal tersebut dikarenakan pemerintah telah menargetkan untuk mulai membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah pada Juli 2021.

Seiring akan dibukanya kembali kegiatan belajar tatap muka, hingga saat ini pemerintah masih belum melakukan vaksinasi untuk dosen dan mahasiswa. Dikabarkan sebelumnya bahwa vaksinasi terhadap dosen dan mahasiswa dijadwalkan berlangsung dari bulan Maret hingga Juni 2021. Namun, hal tersebut langsung di klarifikasi. Juru bicara vaksinasi Covid-19, dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksinasi Corona untuk mahasiswa masuk dalam tahap berbarengan dengan masyarakat. Adapun jadwal vaksinasi untuk masyarakat kemungkinan baru bisa dimulai Mei mendatang. Nantinya, vaksinasi tersebut akan menjadi tahapan akhir dari serangkaian program vaksinasi nasional dalam upaya penanganan Covid-19.

Sebagai mahasiswa, kami pun khawatir jika harus memulai kegiatan belajar tatap muka di kampus sebelum di vaksin. Mengingat di Indonesia telah ditemukan mutasi baru Covid-19 yang lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Sehingga, masih sangat rentan bagi kami untuk bisa memulai kegiatan perkuliahan secara offline lagi. Ditambah lagi prosedur yang akan digunakan untuk pelaksanaan perkuliahan offline masih simpang siur. Namun, setelah mendengar adanya rencana vaksinasi untuk dosen dan mahasiswa, rasa khawatir itu mulai berkurang. Vaksinasi tersebut rencananya dijadwalkan pada bulan Mei, 2 bulan sebelum kampus di buka. Dalam 2 bulan tersebut,

pemerintahan menargetkan vaksinasi dosen, mahasiswa, dan mahasiswa secepatnya selesai. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan dari pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia telah berjalan dengan baik dan cepat hingga sampai saat ini. Adanya tahapan-tahapan seperti yang telah dijelaskan, membuat kegiatan lebih terkoordinasi dengan baik dan mempermudah distribusi vaksin ke seluruh lapisan masyarakat. Cepatnya distribusi vaksin ke masyarakat, akan berdampak pada tingkat penyebaran Covid-19. Semakin cepat masyarakat mendapatkan vaksin, maka tingkat penyebaran Covid-19 akan semakin rendah. Dengan begitu, Indonesia sedikit demi sedikit akan terbebas dari pandemi yang telah lama menjangkiti dunia.

B. Pentingnya Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah telah menetapkan bahwa pandemi *Coronavirus* merupakan bencana no-alam. Hingga saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia telah bekerja sama untuk memerangi Covid-19. Pandemi Covid-19 ini memberikan tantangan besar bagi pemerintah, tenaga medis, maupun masyarakat. Seluruh dunia juga merasakan dampak dari pandemi ini yang bisa dilihat di berbagai sektor diantaranya sektor pendidikan, sosial dan pariwisata. Karena ini perlu dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi.

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun membuat pemerintah melakukan segala upaya agar dapat mencegah penyebaran virus ini. Penerapan di sisi penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker telah berhasil dilaksanakan dan hingga saat ini masih diberlakukan. Namun tentunya dengan penerapan 3M saja tidak cukup untuk memerangi covid-19. Disamping itu, diperlukan vaksinasi untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19. Sejak vaksin Covid-19 tiba di Indonesia banyak dari masyarakat Indonesia belum menyetujui anjuran pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi.

Ahli Kesehatan Hasbullah Thabrany menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 bukan merupakan sejenis obat yang memiliki formula. Vaksin adalah bagian dari virus yang sudah dilemahkan atau tak mampu menyebarkan penyakit yang kemudian disuntikan ke tubuh. Hasbullah juga mengatakan tingkat efektivitas vaksin Covid-19 sekitar 90%. Dengan demikian masih ada kemungkinan 10% tubuh yang sudah di vaksin masih akan bisa terpapar virus Covid-19. Itu

sebabnya, proteksi ganda diperlukan dengan masih menerapkan protokol kesehatan 3M. Vaksin covid-19 memang tidak mencegah virus ini masuk ke dalam tubuh. Tetapi dengan vaksinasi ini diharapkan tubuh dapat mengenali virus covid-19 yang masuk dan dapat mematikan virus tersebut.

Disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa presiden telah mengintruksikan untuk program vaksinasi covid-19. Instruksi tersebut sebagai berikut: 1)Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali, 2)Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021, 3)Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis, 4)Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman, 5)Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Dengan adanya informasi mengenai pentingnya vaksinasi serta manfaat vaksinasi yang telah beredar di berbagai platform seperti televisi maupun media sosial dan juga instruksi presiden seharusnya sudah cukup untuk meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti vaksinasi. Namun tampaknya masyarakat masih ragu untuk melakukan vaksinasi. Dengan melihat kondisi ini, dirasa penting untuk membuat kebijakan mengenai vaksinasi yang diharapkan dapat mencegah virus Covid-19 ini dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi.

Tentunya dengan dibentuknya sebuah kebijakan, pemerintah telah mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setelah itu pemerintah pasti telah melakukan formulasi yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan. Kemudian menganalisis penganggaran, serta membahas bagaimana pelaksanaan program, skenario pelaksanaan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus Covid-19 ini.

Berikut ini beberapa kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia :

1. Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

2. Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Isi dari keputusan ini yaitu : 1)Menetapkan jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, 2)Menetapkan bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapat EUA dari BPOM, 3)Perubahan terhadap jenis vaksin dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi ITAGI dan pertimbangan KPCPEN

Untuk mensukseskan vaksinasi, tak hanya kebijakan yang menjadi usaha pemerintah dalam mencegah Covid-19. Dukungan lain tampak dari fasilitas fiskal dan anggaran khusus untuk mendukung program vaksinasi dan penanganan Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada 7 Desember 2020 menyatakan, -Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin Covid-19 ini sebesar Rp. 50,95 miliar. Dimana untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp. 14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 36,39 miliar.!

Hingga tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah membelanjakan Rp. 637,3 miliar, untuk pengadaan vaksin. Untuk pemenuhan alat pendukung program vaksinasi Covid-19, Kemenkeu telah membelanjakan mulai dari jarum suntik, alkohol swab dan safety box sebanyak Rp 277,45 miliar, juga karena vaksin harus disimpan di tempat pendingin dibelanjakan juga vaksin refrigerator sebanyak 249 unit, cold box sebanyak 249 unit, alat pemantau suhu vaksin 249 unit, vaksin carrier 498 unit, dan alat pelindung diri (APD), dengan total pembelanjaan sebesar Rp 190 miliar.

Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi Covid-19 dan juga usaha lainnya diharapkan mampu untuk menekan penyebaran Covid-19 serta membuat kepercayaan publik untuk melakukan vaksinasi. Keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan ini juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat juga ikut serta dalam program pemerintah mengenai vaksinasi Covid-19. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal vaksinasi ini diharapkan sebagai langkah awal untuk menuju Indonesia bebas Covid-19 sehingga kegiatan sosial, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya dapat kembali normal tanpa adanya kecemasan di masyarakat.

C. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Vaksinasi

Vaksin Covid-19 sendiri bertujuan untuk melindungi diri serta untuk mencegah penularan virus Covid-19, hal ini dijelaskan oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin karena vaksin dapat memberikan tubuh berupa pertahanan dan perlindungan dari virus Covid-19, selain itu vaksin Covid-19 bertujuan untuk melindungi keluarga ataupun orang terdekat dari Covid-19 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya vaksin Covid-19 ini bertujuan untuk melindungi manusia di seluruh dunia, kebijakan vaksinasi ini secara tidak langsung akan membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi Covid-19

Berdasarkan data yang ada pada tanggal 27 Februari 2021, sebanyak 1.616.165 masyarakat di Indonesia telah melakukan vaksinasi, sementara sasaran vaksinasi dari keseluruhan adalah 181.554.465 penduduk atau sekitar 70 persen dari populasi Indonesia sebagai syarat untuk menciptakan kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19, selain itu pemerintah menegaskan kebijakan vaksinasi kepada kelompok masyarakat lansia karena termasuk kelompok yang rentan apabila terkena Covid-19. Dalam menjalankan kebijakan vaksinasi ini, Menteri Kesehatan menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang mengatur tentang Program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada karyawan ataupun buruh, pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang berpartisipasi untuk memberikan vaksin Covid-19 kepada karyawan dan perusahaan beserta dengan anggota keluarganya yang diberikan secara gratis

Kehadiran vaksin Covid-19 muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat, banyak yang mendukung diterapkannya vaksinasi dan ada pula yang masih meragukan keampuhan dari vaksin Covid-19, tidak sedikit masyarakat yang masih menolak kebijakan vaksinasi yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah. Terdapat kekhawatiran yang paling mencolok pada segelintir masyarakat sehingga mereka menolak kehadiran vaksin, kekhawatiran tersebut muncul karena vaksin yang dianggap berbahaya, padahal sudah dapat dipastikan bahwa vaksin justru akan memberikan perlindungan pada tubuh sehingga akan melindungi serta mencegah penularan virus Covid-19, para penolak vaksin juga mempertegas dengan menggunakan

isu mengenai halal haramnya vaksin Covid-19, padahal jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 halal. Masyarakat yang ragu terhadap vaksin Covid-19 tidak seharusnya mendapatkan ancaman dengan hukuman dan denda karena hal tersebut tidak akan mungkin mengubah pandangan irasional mereka mengenai kebijakan vaksinasi, pemerintah harusnya dapat memahami level-level keraguan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi termasuk alasan mereka sehingga dapat menyusun kampanye yang tepat untuk mengubah pikiran dan sikap masyarakat yang akan dituju

Secara psikologis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat menerima atau menolak kebijakan vaksinasi. Pertama adalah keyakinan, keyakinan yang dimaksud di sini adalah bagaimana tolak ukur keyakinan masyarakat terhadap kemanjuran dan keamanan vaksin, sistem kesehatan yang menyediakannya, dan motivasi pengambilan kebijakan program vaksinasi. Kedua adalah kelengahan, hal ini terjadi jika persepsi seseorang mengenai resiko penularan suatu penyakit yang bisa dicegah melalui vaksinasi cenderung rendah. Ketiga adalah kenyamanan, kenyamanan mencakup keterjangkauan biaya, ketersediaan vaksin, kenyamanan dalam pelayanan kesehatan, serta kenyamanan dalam diberlakukannya vaksinasi, kenyamanan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam diterimanya kebijakan vaksinasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Keempat adalah perhitungan manfaat-kerugian, manfaat hingga kerugian yang tertanam dalam pikiran masyarakat diperoleh dari berbagai informasi yang diterima mengenai program vaksinasi. Terakhir adalah program vaksinasi harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, hal ini dikarenakan program vaksinasi baru hanya terlihat manfaatnya jika ada cukup banyak orang yang berhasil divaksin sehingga akan membentuk kekebalan komunitas

Munculnya keraguan terhadap vaksin Covid-19 dikarenakan adanya informasi yang diperoleh dari mulut ke mulut terkait virus Covid-19 yang bisa sembuh dengan sendirinya dengan menerapkan karantina diri, sehingga dengan adanya informasi yang diperoleh dari mulut ke mulut ini masyarakat berpikir untuk apa melakukan vaksinasi jika nantinya bisa sembuh dengan sendirinya, padahal pada dasarnya argumen ini masih diragukan dengan diperkuat adanya angka kematian yang tinggi di Indonesia serta diharuskan memiliki imune tubuh yang benar-benar kebal untuk dapat sembuh dari Covid, informasi yang diperoleh dari mulut ke mulut ini memang benar bahwa Covid-19 bisa sembuh

tanpa diobati meskipun telah terinfeksi namun dengan syarat mereka hanya memiliki gejala ringan

Dalam mensukseskan kebijakan vaksinasi ini diharapkan masyarakat dapat berkampanye tentang kebijakan vaksinasi. Hal ini dikarenakan praktisi kesehatan dan pemerintah hanya dapat mampu mencakup sebagian kecil masyarakat saja, sedangkan para pegiat anti vaksin akan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memutar pikiran para pegiat anti vaksin tersebut bahwa kebijakan vaksinasi penting dilakukan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk melakukan vaksinasi, hal ini dikarenakan Vaksin Covid-19 telah mendapatkan izin penggunaan dari BPOM sehingga telah resmi dan sudah dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, MUI telah mengkaji lebih dalam bahwa bahan baku dan cara pembuatan vaksin Covid-19 dari produsen tersebut menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Dengan adanya pemberian vaksin Covid-19 merupakan suatu langkah besar yang dilakukan pemerintah untuk dapat memutus rantai penularan virus Covid-19, sehingga perlu untuk masyarakat dapat mendukung kelancaran program vaksinasi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia

Tokoh penting yang telah melakukan vaksinasi seperti Presiden merupakan salah satu cara agar nantinya masyarakat dapat ikut mensukseskan kebijakan vaksinasi. Telah ditegaskan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan suatu peran penting terhadap kebijakan vaksinasi, sehingga adanya harapan besar dari pemerintah untuk masyarakat dapat terus mendukung program vaksinasi.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan terhadap kebijakan vaksinasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 merupakan langkah paling rasional untuk dilakukan. Meskipun respon awalnya dari sebagian masyarakat untuk divaksinasi adalah menolak karena dikhawatirkan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya dan semakin memperburuk keadaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak divaksinasi adalah pertama, keyakinan. Sebagian masyarakat ada yang merasa tidak yakin apakah vaksin tersebut aman dan manjur untuk melindunginya dari Covid-19. Kedua adalah

kelengahan, adanya persepsi dari beberapa orang yang beranggapan bahwa pencegahan penularan Covid-19 melalui vaksinasi cenderung rendah. Ketiga adalah kenyamanan, vaksin yang akan didistribusikan oleh pemerintah apakah cukup terjangkau perihal biaya dan ketersediaannya. Keempat adalah manfaat-kerugian, simpang siurnya informasi mengenai manfaat dan kerugian vaksin telah tertanam di pikiran masyarakat.

Melihat respon masyarakat yang masih banyak tidak yakin dengan kebijakan vaksinasi, pemerintah memutuskan untuk membuat landasan hukum terkait pelaksanaan vaksinasi agar masyarakat semakin yakin dan mau untuk berpartisipasi dan mensukseskan kebijakan ini:

1. Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
2. Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Isi dari keputusan ini yaitu: 1) Menetapkan jenis dan kriteria vaksin yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19; 2) Menetapkan bahwa vaksin hanya dapat digunakan bila sudah mendapat EUA dari BPOM; 3) Perubahan terhadap jenis vaksin dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi ITAGI dan pertimbangan KPCPEN.

Vaksin yang digunakan adalah CoronaVac buatan *Sinovac Life Science Co.Ltd.* yang bekerja sama dengan PT Bio Farma dan telah mengantongi izin dari BPOM serta dinyatakan suci oleh MUI. Pelaksanaan vaksinasi pertama kali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021. Kemudian vaksinasi dilakukan kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, warga lansia, tenaga pendidik dan terus berlangsung secara bertahap hingga detik ini. Vaksin yang disuntikkan membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari.

Kami benar-benar berharap semoga dengan adanya kebijakan vaksinasi ini pandemi dapat segera berakhir dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi kebal dengan Covid-19 sehingga bisa melakukan aktifitasnya kembali dengan normal seperti dulu kala.

Ada hal yang perlu menjadi perhatian adalah pertama, pemerintah harus menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan tenaga medis terkait dengan proses berjalannya vaksinasi ini sehingga dapat menghasilkan sinergitas dan efektifitas yang lebih baik lagi dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Kedua, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah harus terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait kebijakan vaksinasi supaya banyak masyarakat yang yakin sehingga mau berpartisipasi dalam vaksinasi.

Ketiga, pada dasarnya yang berperan penting dalam menanggulangi pandemi ini tidak hanya pemerintah saja, namun partisipasi aktif dari masyarakat juga turut serta memperlancar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, jadilah masyarakat yang pintar dan bijak dalam menerima informasi apapun terkait kebijakan vaksinasi ini. Diharapkan untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan saat melakukan aktifitasnya dan mau untuk ikut serta divaksin sehingga angka penyebaran Covid-19 ini dapat ditekan.

REFERENSI

- Akbar, Idil. 2021. Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Academia Praja*. 4 (1): 244-254.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- BPMI Setpres. 2021. _Presiden Jokowi Menerima Vaksin Covid-19 Perdana_. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-menerima-vaksin-covid-19-perdana/>. Diakses pada 20 Maret 2021.
- Chryshna, Mahatma. 2020. _Politikasi Vaksin dan Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia_. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/politisasi-vaksin-dan-program-vaksinasi-covid-19-di-indonesia>. Diakses pada 19 Maret 2021.
- Doni. 2021. Dimulai hari ini, Partisipasi dan Dukungan Masyarakat Tentukan Keberhasilan Vaksinasi Covid-19. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32052/dimulai-hari-ini-partisipasi-dan-dukungan-masyarakat-tentukan-keberhasilan-vaksinasi-covid-19/0/berita>. Diakses pada 18 Maret 2021.
- Fisipol. 2021. Beragam Survei Sebut Penolakan dan Keraguan Masyarakat Terhadap Vaksin COVID-19. <https://fisipol.ugm.ac.id/beragam-survei-sebut-penolakan-dan-keraguan-masyarakat-terhadap-vaksin-covid-19/>. Diakses pada 18 Maret 2021.

- Nadia, Siti. 2021. Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/01/paparan_adinkes_rakernassus.pdf. Diakses pada 18 Maret 2021.
- Nareza, Meva. 2021. Alasan Pentingnya Vaksinasi dan Efektivitasnya dalam Memutus Penularan COVID-19. <https://www.alodokter.com/alasan-pentingnya-vaksinasi-dan-efektivitasnya-dalam-memutus-penularan-covid-19>. Diakses pada 19 Maret 2021.
- Nugraheny, Dian Erika. 2021. 'Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19'. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/05565401/jokowi-indonesia-telah-memiliki-38-juta-dosis-vaksin-covid-19>. Diakses pada 19 Maret 2021.
- Pranita, Ellyvon. 2021. 'Daftar 5 Kelompok Prioritas Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua, dari Guru hingga Pedagang'. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/19/090000723/daftar-5-kelompok-prioritas-vaksinasi-covid-19-tahap-kedua-dari-guru?page=all>. Diakses pada 21 Maret 2021.
- Prodjo, Wahyu A. 2021. 'Vaksinasi Covid-19 untuk Tenaga Pendidik: Persiapan Belajar Tatap Muka dan Target 5 Juta Guru'. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/25/09170451/vaksinasi-covid-19-untuk-tenaga-pendidik-persiapan-belajar-tatap-muka-dan?page=all>. Diakses pada 21 Maret 2021.
- Putri, Arum Sutrisni. 2021. 'Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri'. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>. Diakses pada 19 Maret 2021.
- Ramadhan, Aditya. 2021. Sebanyak 1,6 Juta Penduduk Indonesia Telah Divaksinasi COVID-19. <https://www.antarane.ws.com/berita/2019720/sebanyak-16-juta-penduduk-indonesia-telah-divaksinasi-covid-19#mobile-nav>. Diakses pada 17 Maret 2021.
- Sagita, Nafilah Sri. 2021. 'Belum Masuk Prioritas, Kapan Mahasiswa Divaksin COVID-19? Ini Target Kemenkes'. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5484953/belum-masuk-prioritas-kapan-mahasiswa-divaksin-covid-19-ini-target-kemenkes>. Diakses pada 21 Maret 2021.

- Suryanto, Venny. 2020. Ini Manfaat dan Fungsi Vaksin Covid-19. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-manfaat-dan-fungsi-vaksin-covid-19-1>. Diakses pada 20 Maret 2021.
- Vizki, Havid A. 2021. Partisipasi Masyarakat Menentukan Keberhasilan Vaksinasi. <https://www.republika.co.id/berita/qmvgn8467/partisipasi-masyarakat-menentukan-keberhasilan-vaksinasi>. Diakses pada 19 Maret 2021.
- Zein, Rizqy Amelia. 2021. 27% Penduduk Indonesia Masih Ragu Terhadap Vaksin COVID-19, Mengapa Penting Meyakinkan Mereka. <https://theconversation.com/27-penduduk-indonesia-masih-ragu-terhadap-vaksin-covid-19-mengapa-penting-meyakinkan-mereka-150172>. Diakses pada 18 Maret 2021.
- Zuhad, Ahmad. 2021. Pembelajaran Tatap Muka Ditargetkan Juli, Vaksinasi Covid-19 Guru dan Mahasiswa Mulai Berjalan. <https://www.kompas.tv/article/152976/pembelajaran-tatap-muka-ditargetkan-juli-vaksinasi-covid-19-guru-dan-mahasiswa-mulai-berjalan>. Diakses pada 20 Maret 2021.



ISBN 978-623-92037-4-0 (PDF)



9 786239 203740